

**ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN INKLUSIF
BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM RENCANA
KERJA PEMBANGUNAN DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi
Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

ABSTRAK

Masyitoh Zahra, No BP: 1910843012, Analisis Perencanaan Pembangunan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Rencana Pembangunan Daerah di Kota Padang, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2023, Dibimbing Oleh: Dr. Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA dan Ibu Dr Desna Aromatica, S.AP, M.AP. Skripsi ini terdiri dari 125 halaman dengan referensi 6 buku teori 5 buku metode, 1 skripsi, 1 Thesis, 21 jurnal, 5 dokumen, dan 4 website internet.

Perencanaan Pembangunan inklusif yang sesuai dengan acuan SDG'S, bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, merata, dan berkelanjutan, di mana semua individu dan kelompok memiliki akses yang setara terhadap peluang, sumber daya, dan manfaat pembangunan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua warga Kota Padang, termasuk penyandang disabilitas, dapat menikmati fasilitas dan layanan yang sama. Peraturan mengenai hak-hak disabilitas sudah lama dikeluarkan. Namun sampai saat ini yang paling sedikit merasakan hasil pembangunan adalah disabilitas dan belum meratanya hak-hak disabilitas.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai informan terkait Perencanaan Pembangunan Inklusif dengan menggunakan teknik purposive sampling dalam pengambilan sumber data dan ditambah dengan Observasi dan Dokumentasi sebagai data pendukung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perencanaan partisipatif yang dikemukakan Wicaksono dan Sugiarto yang terdiri dari variabel yaitu Terfokus Kepada Kepentingan Masyarakat; Partisipatoris; Sinergitas; dan Legalitas.

Hasil penelitian ditemukan bahwa berdasarkan acuan pembangunan SDG'S No.16 tentang meningkatkan Masyarakat yang Inklusif dan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas, Kota Padang masih belum tercapai sebagai kota Inklusif. Hal ini terjadi karena masih belum maksimalnya pendataan penyandang disabilitas di setiap kelurahan dan Kurangnya partisipasi Penyandang Disabilitas dalam mengikuti Musrenbang. Lalu, Masih banyaknya hambatan keterlibatan Penyandang Disabilitas Ketika mengikuti Proses Perencanaan Pembangunan. Serta kurangnya keefektifan Pembangunan yang sudah dilakukan di Kota Padang yang bisa dirasakan Bersama oleh Penyandang disabilitas. Legalitas dalam perencanaan pembangunan sudah diterapkan oleh pemerintah Kota Padang akan tetapi keefektifan dan efisien untuk bisa dinikmati bersama oleh penyandang disabilitas masih jauh dari inklusifitas akan tetapi pada variabel Sinergitas sudah cukup baik dimana pembangunan dilanjutkan dari pembangunan yang sebelumnya dan semua pihak sudah saling bersinergi dalam perencanaan pembangunan di kota Padang.

Kata Kunci: Pembangunan Inklusif, Perencanaan Partisipatif, Penyandang Disabilitas, RKPD

ABSTRACT

Masyitoh Zahra, No BP: 1910843012, Analysis of Inclusive Development Planning for People with Disabilities in the Regional Development Plan in Padang City, Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang, 2023, Supervised By: Dr. Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA and Dr. Desna Aromatica, S.AP, M.AP. This thesis consists of 125 pages with references to 6 theory books, 5 method books, 1 thesis, 1 dissertation, 21 journals, 5 documents, and 4 internet websites.

Inclusive development planning, in line with the SDGs, aims to create a fair, equitable, and sustainable society where all individuals and groups have equal access to opportunities, resources, and development benefits. It is crucial to ensure that all residents of Padang City, including people with disabilities, can enjoy the same facilities and services. Regulations regarding disability rights have long been established. However, until now, those who have benefited the least from development outcomes are people with disabilities, and disability rights have not been evenly distributed.

The approach used in this research is descriptive with a qualitative method. Data collection was conducted by interviewing informants related to Inclusive Development Planning using purposive sampling technique in data collection, supplemented by observation and documentation as supporting data. The theory used in this research is participatory planning proposed by Wicaksono and Sugiarto, consisting of variables focused on community interests, participatory, synergy, and legality.

The research findings indicate that based on the SDGs No.16 reference on enhancing Inclusive Society and Law No.8 of 2016 on fulfilling the rights of People with Disabilities, Padang City has not yet achieved the status of an inclusive city. This is due to the still incomplete data collection of people with disabilities in each sub-district and the lack of participation of People with Disabilities in participating in Musrenbang (local development planning meetings). Additionally, there are still many obstacles to the involvement of People with Disabilities in the Development Planning Process. Furthermore, the lack of effectiveness of the development already carried out in Padang City that can be felt collectively by people with disabilities. Legal aspects in development planning have been implemented by the Padang City government, but the effectiveness and efficiency for people with disabilities to enjoy together are far from inclusivity. However, in terms of synergy variables, it is quite good, where development continues from previous ones, and all parties have synergized in the development planning in Padang City.

Kata Kunci: Inclusive Development, Participatory Planning, Disabilities, Regional Development Planning.